

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu tekad perubahan fisik ataupun tekad suatu masyarakat untuk berusaha dan melalui suatu kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional, agar mencapai kehidupan yang lebih baik (Todaro, 2000). Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan. Tingkat pendapatan sering kali digunakan sebagai indikator tingkat keberhasilan ekonomi suatu negara, akan tetapi peningkatan pendapatan masyarakat belum tentu menjamin tingkat kesejahteraan anggota masyarakat luas karena dengan banyaknya variasi pendapatan yang dihasilkan antar rumah tangga.

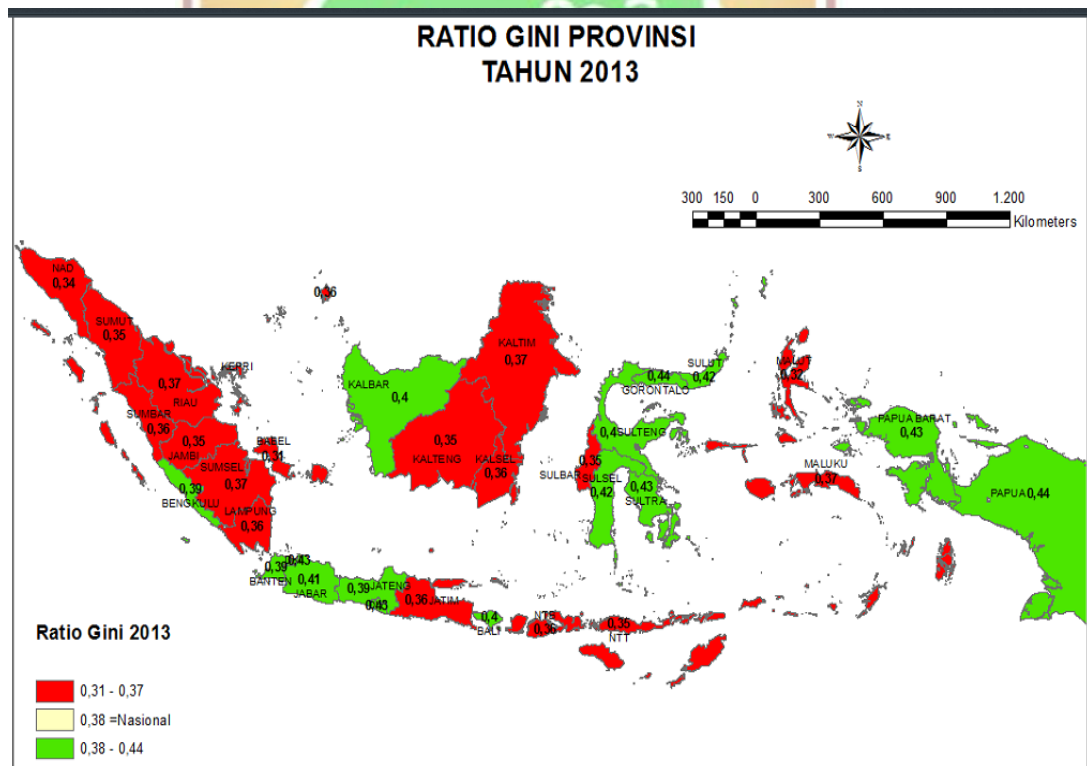
Pembangunan ekonomi akan menyebabkan terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan diiringi oleh perubahan distribusi output dan struktur ekonomi. Disisi lain, pembangunan ekonomi yang sangat menekankan pada pertumbuhan ekonomi selama ini akan berdampak pada melebarinya ketimpangan sosial ekonomi suatu wilayah (Mopangga, 2011). Ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi antar wilayah juga akan memperdalam sifat saling melemahkan antar wilayah, karena wilayah yang memiliki sumberdaya yang melimpah akan di eksploitasi secara besar besaran, akibatnya daerah yang memiliki sumberdaya melimpah menjadi lemah dalam segi ekonomi.

Masalah yang selalu dihadapi oleh negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok masyarakat berpendapatan rendah (Tambunan, dalam Idris. et al, 2014). Ketimpangan pendapatan tidak hanya dirasakan oleh negara yang berkembang saja negara maju sekalipun juga mengalami masalah ini, akan tetapi semua terletak pada perbedaan besar kecilnya ketimpangan serta cara penanggulanginya. Oleh karena itu ketimpangan pendapatan yang terjadi tidak bisa dihilangkan akan tetapi bisa diatasi dengan mengurangi proporsi besar kecilnya ketimpangan tersebut.

Ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia diukur menggunakan beberapa indikator diantaranya adalah Gini Rasio. Gini Rasio merupakan alat untuk mengukur ketimpangan pembagian relatif pendapatan antar penduduk suatu negara. Gini rasio dengan asumsi-asumsinya bisa juga digunakan sebagai analisis perbandingan pembagian pendapatan relatif antar negara dan kecenderungan kepincangan pembagian pendapatan antar masyarakat anggota tertentu seperti antar negara, antar provinsi , kota dan desa bahkan ketimpangan antar gender (Syamsuddin, 2011).

Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang juga tidak terlepas dari masalah ketimpangan pendapatan. Indonesia dengan populasi terbesar ke 4 dunia dengan lebih dari 258 juta jiwa pada tahun 2016 dengan total daerah atau provinsi sebanyak 34 provinsi. Karakteristik wilayah yang berbeda adalah konsekuensi yang harus diterima oleh Indonesia, karena karakteristik wilayah

merupakan pengaruh kuat dalam menciptakan pola pembangunan ekonomi, sehingga menjadi hal yang sangat wajar bila pembangunan ekonomi di Indonesia tidak seragam. Ketidakseragaman pembangunan di Indonesia akan mengakibatkan beberapa daerah tumbuh dengan pesat dan daerah lainnya tumbuh sangat lambat, sehingga ketimpangan di beberapa daerah terjadi di Indonesia baik ketimpangan pembangunan maupun ketimpangan pendapatan (Putra, 2011).



Sumber: Badan Pusat Statistik 2013

Dari gambar diatas Indonesia pada tahun 2013 mengalami ketimpangan yang cukup menonjol khususnya wilayah bagian timur Indonesia dengan penyebaran indeks gini 0.34 sampai 0.44. Ketimpangan pendapatan di

Indonesia sudah masuk dalam radar bahaya karena memiliki indeks 0.38 untuk nasional sedangkan berdasarkan provinsi sudah sangat timpang yang menandakan kekayaan alam di Indonesia hanya dikuasai oleh sebagian penduduk yang berpendapatan sangat tinggi. Untuk wilayah Sumatera ketimpangan masih berada dibawah indeks gini nasional, akan tetapi ketimpangan di Sumatera tidak berbeda jauh dari nasional yang dalam periode kedepan bisa melebihi kategori indeks gini yang sangat timpang. Jadi dalam penelitian ini, peneliti hanya meneliti dengan ruang lingkup provinsi di pulau Sumatera, karena untuk wilayah Jawa, Kalimantan dan Papua sudah banyak penelitian sebelumnya terkait ketimpangan pendapatan.

Pulau Sumatera terletak di bagian barat gugusan pulau Indonesia dengan luas 480.793,28 Km² serta jumlah penduduk yang berkisar 53.430.321 jiwa. Pulau Sumatera terbagi dari 10 provinsi yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Sumatera adalah pulau yang subur dan kaya dengan sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, timah, bijih besi dan masih banyak lagi. Jumlah penduduk di Sumatera juga tergolong ideal dibandingkan dengan luas wilayahnya.

Salah satu cara ataupun instrument yang dilakukan pemerintah dalam membangun perekonomian adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal dalam kebijakan otonomi daerah adalah wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola segala urusan pemerintahannya. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan kebijakan sistem pemerintahan yang memberikan otonomi yang luas dengan

tujuan peningkatan pelayanan publik (Miyasto dan Apriesa, 2013). Putri dan Natha (2014) melakukan penelitian bahwa desentralisasi fiskal diperlukan untuk menekan tingkat ketimpangan pendapatan dengan mengelola kembali sumber sumber keuangan yang ada di daerah.

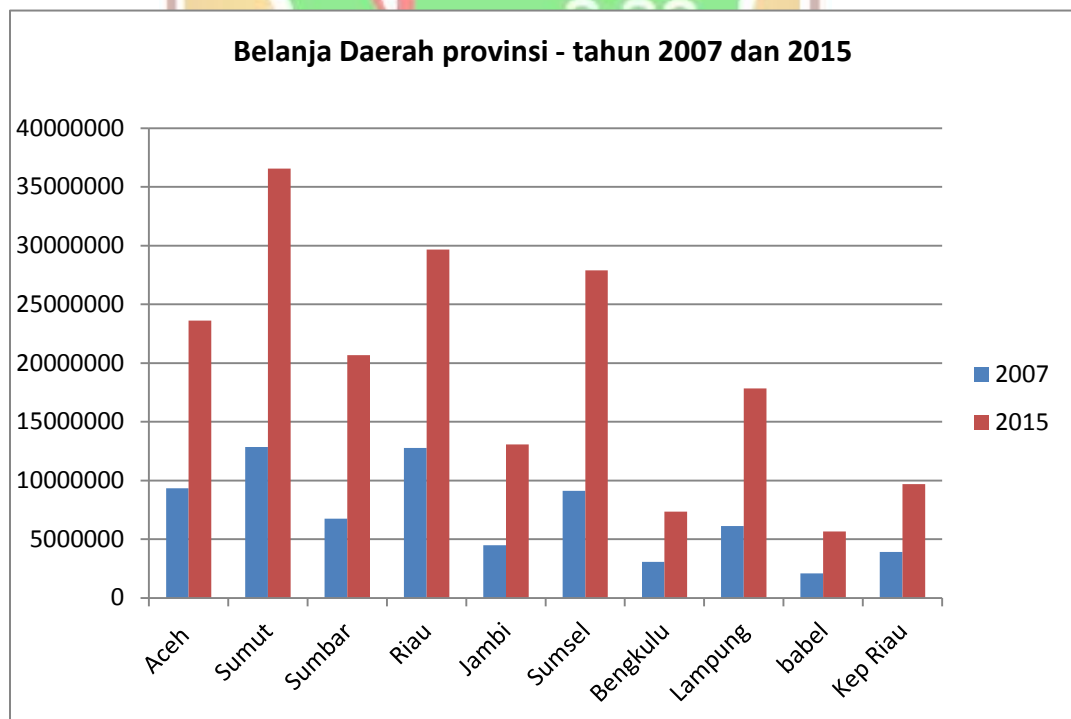
Sejak tahun 2001 otonomi daerah dilakukan di Indonesia yang dengan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, sehingga peranan pemerintah sangat berperan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Peranan pemerintah sangat penting, karena dengan melalui kebijakan, anggaran serta sistem kelembagaannya akan memastikan masyarakat memperoleh kesempatan yang setara, karena peranan pemerintah dapat memperkecil ketimpangan yang besar (Bahagijo. *et al*, 2014).

Sejalan dengan konsep otonomi daerah, pengeluaran pemerintah adalah alat intervensi terhadap perekonomian paling efektif. Menurut Sukirno (2002) pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan untuk kegiatan administrasi dan mendukung kegiatan-kegiatan perekonomian. Kapasitas kemampuan keuangan daerah terlihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semakin besar belanja daerah di APBD maka diharapkan akan meningkatkan kegiatan perekonomian daerah, sehingga pendapatan dan kesejahteraan meningkat.

Anggaran belanja merupakan pernyataan mengenai kinerja pemerintah yang hendak dicapai dalam periode waktu tertentu yang diukur berdasarkan finansial. Pemerintah dianggap salah satu pelaku ekonomi yang sangat penting dalam perekonomian modern. Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah

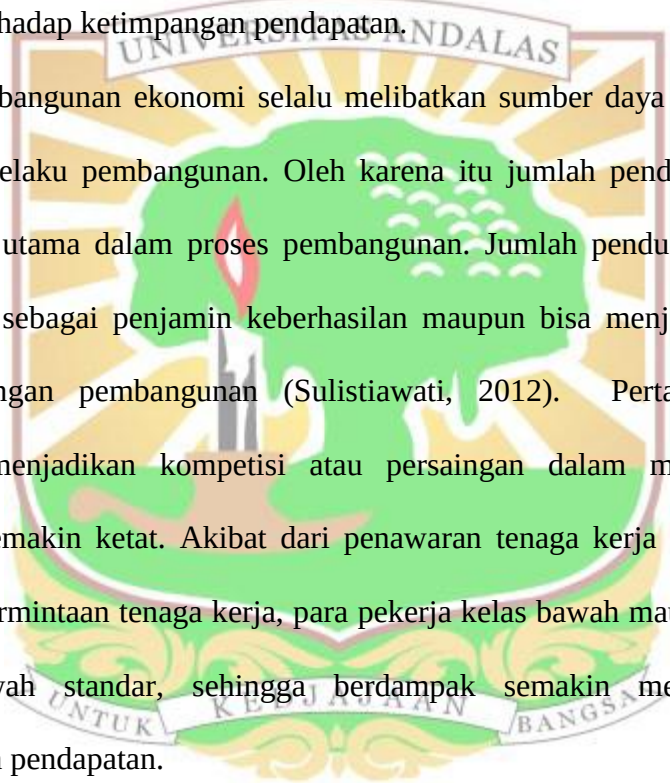
ditunjukkan untuk perubahan struktur ekonomi berdasarkan APBN ataupun APBD. Secara teoritis pengeluaran pemerintah yang diperuntukkan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan akan mendorong peningkatan pendapatan perkapita dari tahun ke tahun (Sari. *et al*, 2016). Apabila tidak adanya campur tangan pemerintah maka proses industri, perdagangan, perbankan, akan menumpuk di daerah tertentu, sedangkan daerah lainnya akan menjadi terbelakang. Oleh karena itu diperlukan campur tangan pemerintah guna mengatasi ketimpangan tersebut.

Gambar 1.2 Perkembangan Belanja Daerah Per Provinsi di Sumatera tahun 2007 dan 2015 (Juta Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah

Pada gambar 1.2 diatas memperlihatkan realisasi belanja daerah yang bervariasi antar Provinsi di pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Selatan mempunyai pengeluaran belanja daerah terbesar di Pulau Sumatera, sedangkan Provinsi Bengkulu dan Bangka Belitung memperlihatkan belanja daerah terkecil di pulau Sumatera pada tahun 2007 hingga 2015. Perbedaan dalam pengeluaran pemerintah di pulau Sumatera secara teori akan berimbas terhadap ketimpangan pendapatan.



Pembangunan ekonomi selalu melibatkan sumber daya manusia sebagai salah satu pelaku pembangunan. Oleh karena itu jumlah penduduk merupakan salah unsur utama dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk dalam suatu negara bisa sebagai penjamin keberhasilan maupun bisa menjadi beban dalam keberlangsungan pembangunan (Sulistiawati, 2012). Pertambahan jumlah penduduk menjadikan kompetisi atau persaingan dalam mencari lapangan pekerjaan semakin ketat. Akibat dari penawaran tenaga kerja yang lebih besar dari pada permintaan tenaga kerja, para pekerja kelas bawah mau dibayar dengan upah dibawah standar, sehingga berdampak semakin meluasnya tingkat ketimpangan pendapatan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah tingkat upah. Penduduk yang sudah memasuki angkatan kerja akan membutuhkan upah yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi karena kesempatan kerja atau peluang kerja sangat kompetitif maka akan berimbas terhadap tingkat pengangguran. Regulasi mengenai pengupahan diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 05 /Men/1989 Tentang

Upah Minimum, yang saat ini dikenal dengan istilah Upah Minimum Provinsi(UMP) untuk provinsi sedangkan untuk Kabupaten/Kota dikenal dengan istilah (UMK).

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik menganalisa mengenai ketimpangan pendapatan di Sumatera yang dilihat berdasarkan Indeks Gini. Kemudian penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI, PENGANGGURAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PULAU SUMATERA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang dijabarkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan ketimpangan pendapatan pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera pada tahun 2007 hingga tahun 2015
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), pengangguran dan belanja daerah terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera pada tahun 2007 hingga tahun 2015.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan ketimpangan pendapatan pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera pada tahun 2007 hingga tahun 2015.

2. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), pengangguran dan belanja daerah terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera pada tahun 2007 hingga tahun 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan dan terjawabnya masalah dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat terhadap berbagai kalangan. Baik dari akademis, pemerintahan maupun masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat dari penelitian ini:

1. Untuk Akademis, memberikan pengetahuan secara ilmiah kepada para mahasiswa, dosen dan peneliti mengenai ketimpangan pendapatan di pulau Sumatera.
2. Untuk Pemerintah, Penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah antar Provinsi di Pulau Sumatera sebagai bahan informasi, perbandingan, dan acuan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan.
3. Penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai bahan tambahan mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Topik utama dalam penelitian ini adalah Ketimpangan pendapatan yang dihitung menggunakan Indeks Gini. Variabel yang mempengaruhi dalam penelitian ini adalah Upah Minimum Provinsi (UMP), Pengangguran dan Belanja Daerah. Penelitian ini mencakup 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Data yang digunakan dalam

meneliti hubungan variabel dependen dan independen adalah 9 tahun (2007-2015). Untuk memenuhi syarat analisis serta menjawab permasalahan dari penelitian ini maka digunakan kombinasi dari data tahunan (time series) antar Provinsi di Pulau Sumatera (cross section) yang dibentuk menjadi sebuah data panel untuk pengolahan lebih lanjut.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat untuk memberikan gambaran menyeluruh dari penelitian ini yang terdiri dari enam bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari 6 sub bab pokok yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN LITERATUR

Pada bab ini berisi teori-teori yang mendukung yang berkaitan dengan ketimpangan distribusi pendapatan, upah minimum provinsi(UMP), pengangguran dan belanja daerah. Selain itu, bab ini juga membahas berbagai penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Kemudian disusun beberapa hipotesa sebagai jawaban sementara dari rumusan masalah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian terdiri dari sub bab di antaranya: lokasi penelitian, data dan sumber data, definisi operasional variabel, model penelitian, metode analisis data, pemilihan metode, uji asumsi klasik dan uji statistik.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Di dalam gambaran umum dijelaskan mengenai gambaran wilayah, kependudukan dan ekonomi di pulau Sumatera. Pada bab ini juga membahas perkembangan dari masing masing variabel di pulau Sumatera.

BAB V : HASIL PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diperoleh dari hasil pengolahan data. Pada bab ini juga menguraikan hasil dari beberapa uji untuk kelengkapan penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

